

IKP KABUPATEN MUKOMUKO

LANDASAN HUKUM PENCEGAHAN TERKAIT PEMETAAN KERAWANAN PEMILU

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 228 huruf g

Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 Ayat 1 Huruf

Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :

(1) Pelanggaran Pemilu; dan (2) Sengketa Proses Pemilu

(Pasal 93/b) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pasal 93 huruf b,

Bawaslu Bertugas :

Mengidentifikasi dan memetakan potensi serta pelanggaran Pemilu (94/1a)

Definisi dan Tujuan

Segala hal yang mengganggu atau menghamabat proses Pemilu/Pilkada yang Demokratis

- Alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan
- Alat Pemetaan, Pengukuran Potensi, Prediksi, dan Deteksi Dini

Dimensi IKP Pilkada 2020



KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

Keamanan Lingkungan,
Otoritas Penyelenggara
Pemilu, Otoritas
Penyelenggara Negara,
Relasi Kuasa di Tingkat
Lokal



PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL

Hak Pilih, Pelaksanaan
Kampanye, Pelaksanaan
Pemungutan Suara,
Ajudikasi Keberatan
Pemilu, Pengawasan
Pemilu



KONTESTASI

Hak politik, Proses
Pencalonan,
Kampanye Calon.



PARTISIPASI

Partisipasi Pemilih,
Partisipasi Partal
Politik, Partisipasi
Publik.

DIMENSI KONTEKS SOSIAL POLITIK

Sub Dimensi



Relasi kuasa
di tingkat lokal



Otoritas Penyelenggara
Pemilu



Penyelenggara Negara



Keamanan

Indikator Dominan IKP Pilkada Serentak 2020 per Dimensi Konteks Sosial Politik

1. Tidak netralnya ASN
2. Pemberian uang/barang/jasa ke pemilih untuk memilih calon tertentu saat masa kampanye
3. Perubahan hasil rekapitulasi suara di tingkat desa/kecamatan/kab-kota/provinsi
4. Pemberian uang/barang/jasa ke pemilih untuk memilih calon tertentu saat masa tenang
5. Putusan KASN terkait tidak netralnya ASN
6. Penyelenggara pemilu yang melanggar azas netralitas
7. KPU melakukan pelanggaran prosedur
8. Demonstrasi pasca perhitungan suara
9. Kekerasan non fisik pada penyelenggara
10. Putusan DKPP terkait penyelenggara pemilu yang melanggar azas profesionalitas
11. Mobilisasi ASN untuk mendukung calon tertentu
12. Aduan terkait proses rekrutmen penyelenggara pemilu
13. Memberian uang/barang/jasa untuk memilih calon tertentu saat pemungutan suara
14. Kekerasan fisik pada penyelenggara
15. Putusan DKPP terkait penyelenggara pemilu yang melanggar PROSEDUR

DIMENSI PENYELENGGARAAN PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL

Sub



Hak Pilih



Pengawasan
pemilu



Pelaksanaan
Pemungutan Suara



Ajudikasi keberatan
Pemilu



Pelaksanaan Kampanye

Indikator Dominan IKP Pilkada Serentak 2020 per Dimensi PPBA

1. Daftar pemilih ganda
2. Rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang di tingkat TPS
3. Terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPT
4. Rekomendasi Bawaslu untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat TPS/Kecamatan/Kab-Kota
5. Tentang jumlah surat suara yang kurang dari yang ditentukan
6. KPPS salah menginput data hasil perhitungan suara (problem teknis)
7. Terkait pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS
8. Selisih suara dalam rekapitulasi hasil suara di tingkat TPS/kecamatan/Kab-Kota/Provinsi
9. PPK salah menginput data hasil rekapitulasi suara (problem teknis)
10. Saksi perwakilan peserta pemilu tidak hadir saat penghitungan suara
11. Terkait pemilih yang tidak memiliki KTP-el
12. Saksi perwakilan peserta pemilu tidak hadir saat proses pemungutan suara
13. Website dan sistem informasi KPU (Situng, Silon, JDIH, PPID, Sipol, Sidalih, dll.) tidak dapat diakses dengan baik
14. DPK yang tidak masuk dalam DPT
15. Keterlambatan distribusi logistik (karena cuaca, geografis, teknis)

DIMENSI KONTESTASI

Sub



Proses pencalonan



Kampanye Calon



Indikator Dominan IKP Pilkada Serentak 2020 per Dimensi Kontestasi

1. Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan
2. Praktik politik uang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu
3. Praktik mahar politik
4. Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye oleh peserta pemilu
5. Peserta pemilu yang melakukan kampanye di luar jadwal
6. Iklan kampanye di luar jadwal
7. Politik uang pada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial untuk memilih calon tertentu
8. Konflik antarpemilihan
9. Konflik antarpeserta
10. Praktik politik uang kepada tokoh untuk memilih calon tertentu

DIMENSI PARTISIPASI POLITIK

Sub Dimensi



Partisipasi Publik



Partisipasi Pemilih



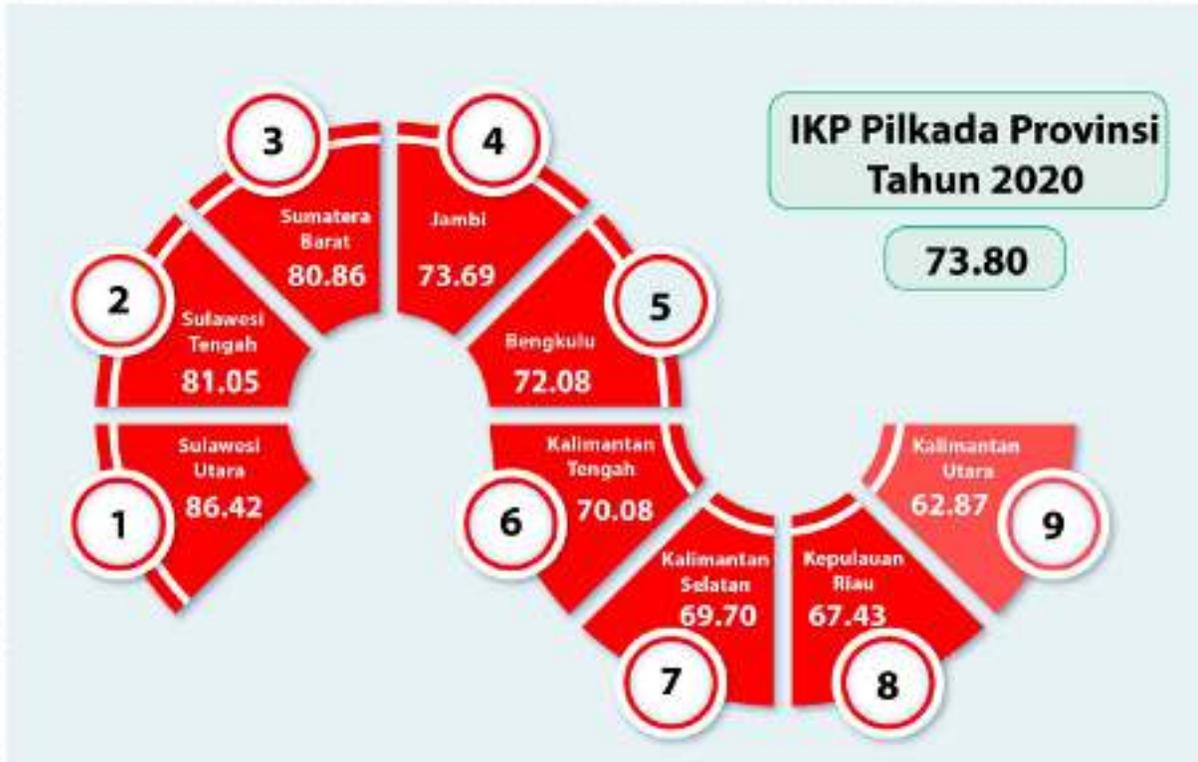
Partisipasi Partai Politik



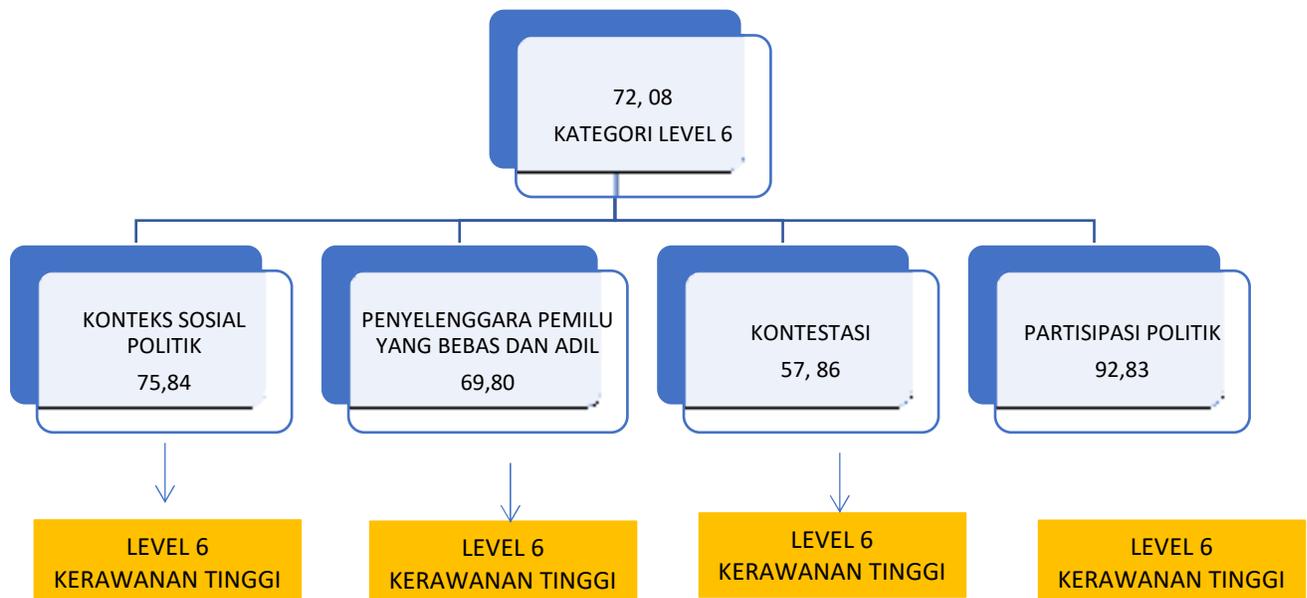
Indikator

1. Partisipasi di bawah 77,5%
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada
3. Rendahnya partisipasi peserta pemilu dalam proses edukasi politik masyarakat
4. Rendahnya partisipasi partai politik dalam pengusungan calon kepala daerah
5. Jumlah suara tidak sah

IKP PILKADA SERENTAK 2020 TINGKAT PROVINSI



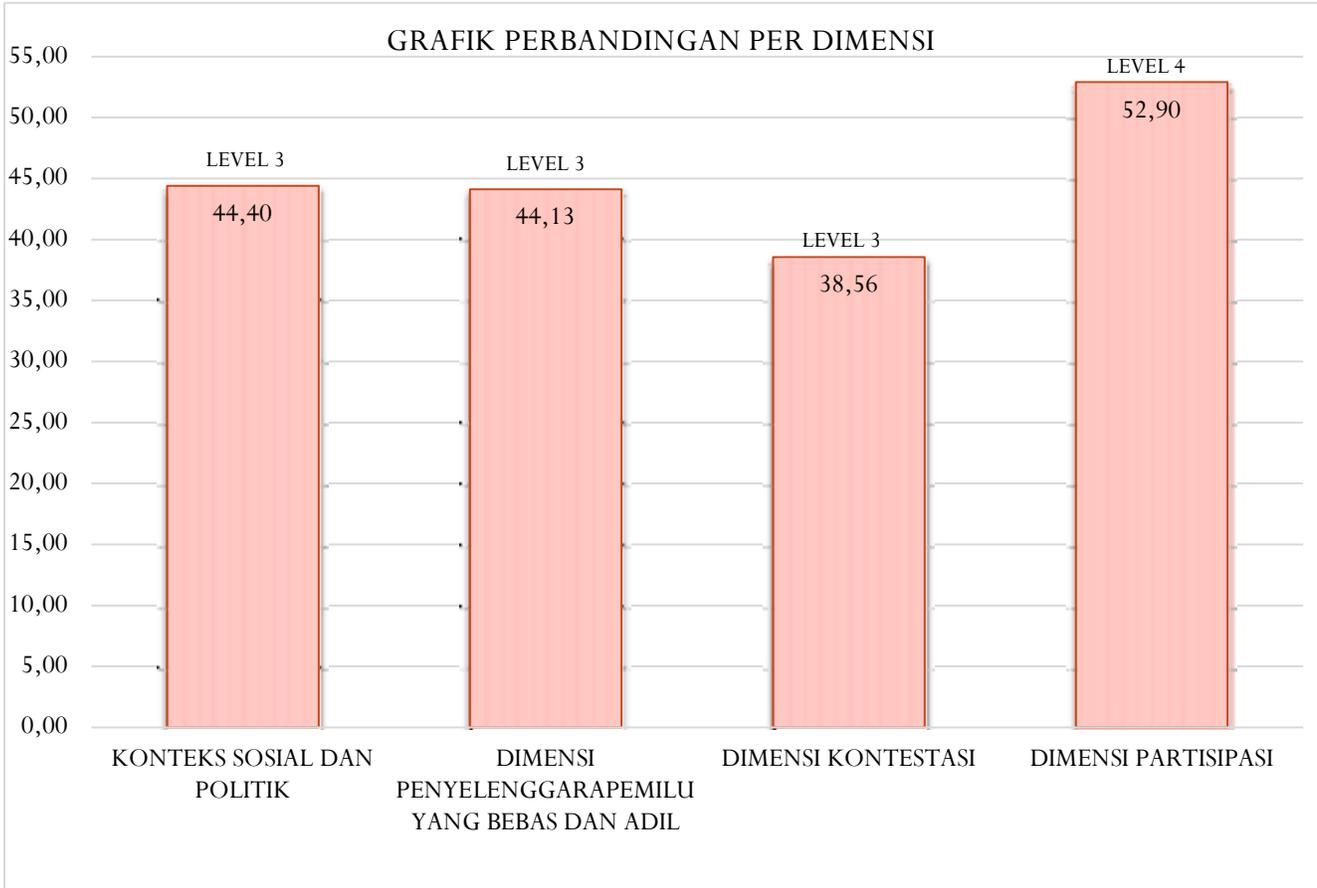
IKP PILKADA PROVINSI BENGKULU



KATEGORI LEVEL IKP PILKADA SERENTAK 2020 TINGKAT KABUPATEN/KOTA



IKP PILKADA TAHUN 2020 KABUPATEN MUKOMUKO



REKOMENDASI

- **Penyelenggara Pemilu** meningkatkan pelayanan terutama terhadap proses pencalonan (perseorangan dan partai politik), akurasi data pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- **Partai Politik** meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan dan melakukan pendidikan politik yang intensif sepanjang tahapan Pilkada.
- **Pemerintah (Pusat dan Daerah)** memastikan dukungan pelaksanaan Pilkada dan mengintensifkan forum-forum komunikasi (Forkopimda, FKUB) untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan.
- **POLRI, TNI, BIN, BINDA** menguatkan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP.
- **ORMAS dan OKP** memperluas jaringan pemantauan Pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis.

IKP PILKADA 2020

Variabel Dimensi Subdimensi	Variabel Dimensi Subdimensi	SKOR	KATEGORI
Kerawanan Pemilu	Konteks Sosial dan Politik	44,40	Kerawanan Sedang
	Penyelenggaraan yang bebas dan adil	44,13	Kerawanan Sedang
	Kontestasi	38,56	Kerawanan Rendah
	Partisipasi	52,90	Kerawanan Sedang

Sumber Bawaslu RI diolah dari data Kuisisioner Bawaslu Kabupaten Mukomuko tahun 2019



IKP PEMILU 2019

Variabel Dimensi Subdimensi	Variabel Dimensi Subdimensi	Variabel Dimensi Subdimensi	SKOR	KATEGORI
Kerawanan Pemilu	Konteks Sosial Politik	Keamanan	39,29	Kerawanan Sedang
		Otoritas Penyelenggara Pemilu	40,96	Kerawanan Sedang
		Penyelenggara Negara	45,39	Kerawanan Sedang
		Relasi kuasa di tingkat lokal	30	Kerawanan Rendah
	Penyelenggaraan yang bebas dan adil	Hak pilih	54,55	Kerawanan Sedang
		Kampanye	56,25	Kerawanan Sedang
		Pelaksanaan pemungutan suara	43,33	Kerawanan Sedang
		Ajudikasi keberatan Pemilu	37,5	Kerawanan Sedang
		Pengawasan Pemilu	43,75	Kerawanan Sedang
	Kontestasi	Hak politik terkait gender	50	Kerawanan Sedang
		Representasi minoritas	50	Kerawanan Sedang
		Proses pencalonan	43,48	Kerawanan Sedang
	Partisipasi	Partisipasi pemilih	39,47	Kerawanan Sedang
		Partisipasi partai	40,54	Kerawanan Sedang
		Partisipasi kandidat	40	Kerawanan Sedang
		Partisipasi publik	42,86	Kerawanan Sedang

Sumber Bawaslu RI

DATA POTENSI KERAWANAN PEMILIHAN 2020

KABUPATEN MUKOMUKO		
1	LUAS WILAYAH	4.036,7 Km ²
3	JML DESA/KELURAHAN	148 Desa/ 3 Kelurahan
4	JML TPS	567
5	DPT PILEG/PILPRES 2019	126.249
6	TREND/ POTENSI KERAWANAN:	
	a. TAPAL BATAS 1. Perpindahan Penduduk Saat Hari Pencoblosan (Exodus)	3 Kecamatan: Lubuk Pinang, Air Rami dan Malin Deman
	b. PENGGELEMBUNGAN SUARA (SEBUTKAN BENTUK KERAWANAN) 1. Pemilih mencoblos lebih dari satu kali 2. Pemilih Tidak terdaftar pada DPT	Kecamatan V Koto, Malin Deman dan Selagan Raya
	c. GEOGRAFIS (SEBUTKAN BENTUK KERAWANAN) 1. Jarak antar Desa dan atau TPS yang berjauhan	3 Kecamatan : Kec. Air Rami, Penarik, Malin Deman dan Selagan Raya
	d. MONEY POLITIK (SEBUTKAN BENTUK KERAWANAN) - money politik terselubung; 1. melalui penjualan hasil panen yang dilebihkan pembayaran 2. pembayaran rekening listrik dari Calon 3. bantuan penimbunan jalan oleh calon kepada masyarakat.	Potensi seluruh Kecamatan
	e. KERAWANAN LAINNYA yang terjadi di Kecamatan (sesuai karakteristik lokal) 1. adanya komunitas lokal yang antipati terhadap Pemilu (khilafatul muslimin) 2. Pemilih yang merupakan pekerja perusahaan perkebunan yang berpindah tempat kerja (berpotensi tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memilih pada hari pencoblosan) 3. Pekerja nelayan yang tidak menggunakan hak pilih pada hari pencoblosan	- Kecamatan Teras terunjam - Kecamatan Air Dikit, Teras Terunjam, Penarik, Pondok Suguh, V Koto, Malin Deman - Kecamatan Kota Mukomuko, Teramang Jaya, Ipuh dan Air Rami
	f. Netralitas ASN/TNI/POLRI g. Netralitas Kepala Desa	- -

TITIK KERAWANAN TAHAPAN PILEG PILPRES 2019

TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Kecamatan	Permasalahan
V KOTO	perbedaan pleno rekapitulasi pada tingkat desa dan kecamatan
PENARIK	perbedaan pleno rekapitulasi pada tingkat desa dan kecamatan
XIV KOTO	perbedaan pleno rekapitulasi pada tingkat desa dan kecamatan

TAHAPAN KAMPANYE

Dugaan pelanggaran iklan kampanye di media cetak	Dugaan pelanggaran iklan kampanye di media elektronik	Dugaan pelanggaran iklan kampanye di radio	Jml
16	0	0	16

Dugaan Pelanggaran tempat yang dilarang Kampanye

DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE DI TEMPAT IBADAH	DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN	DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE DI FASILITAS PEMERINTAH	JUMLAH
1	3	2	6

Dugaan Pelanggaran unsur yang dilarang dalam Kampanye

DUGAAN PELANGGARAN KETERLIBATAN ASN	DUGAAN PELANGGARAN KETERLIBATAN ANGGOTA POLISI	DUGAAN PELANGGARAN KETERLIBATAN ANGGOTA TNI	DUGAAN PELANGGARAN KETERLIBATAN PEJABAT NON PARPOL	DUGAAN PELANGGARAN KETERLIBATAN PEJABAT BUMN/BUMD	JML
8	0	0	0	0	8

TITIK FOKUS KERAWANAN KEKURANGAN LOGISTIK PILEG PILPRES 2019

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Lubuk Pinang		
	Lubuk Pinang	3
Kota Mukomuko		
	Pasar Mukomuko	7
	Pasar Mukomuko	3
	Pasar Mukomuko	4
	Koto Jaya	2
	Ujung Padang	2
	Selagan Jaya	3
	Selagan Jaya	5
	Bandar Ratu	4
	Bandar Ratu	3
Air Rami		
	Makmur Jaya	1
	Mekar Jaya	3
Teras Terunjam		
	Tunggal Jaya	2
Ipuh		
	Semudam	2
Penarik		
	Sido Mulyo	3
	Penarik	11
	Penarik	1
Malin Deman		
	Lubuk talang	2
		3
Air Manjuto		
	Manjuto Jaya	2
	Kota Praja	1
Teramang Jaya		
	Nelan Indah	3
	Lubuk Selandak	2
	Sido Makmur	3
	Mandi Angin Jaya	2
	Pernyah	1
	Batu Ejung	1
		3
V Koto		
	Sungai Rengas	1
		2
	Pondok Tengah	1
	Pondok Panjang	1
		2

		3
Sungai Rumbai	Sidodadi	3
Ipuh	Semundam	2
	Medan Jaya	5
	Tanjung Harapan	2
	Mundam Marap	2
	Pulai Payung	2
		1
		5
	Air Buluh	1
		2
		3
XIV. Koto		
	Rawa Bangun	1

DATA PERISTIWA PILEG – PILPRES 2019 dan PILKADA 2015

I. TABEL KERAWANAN (PILGUB/PILBUB/PILWALKOT) PILKADA KABUPATEN MUKOMUKO BERDASARKAN PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 DAN PILKADA 2015

NO	KERAWANAN	KATEGORI					JML
		SR (1)	R (2)	S (3)	T (4)	ST (5)	
1	Konflik/bentrok fisik	X					1
2	Serangan terhadap penyelenggara pemilu	X					1
3	Serangan terhadap kelompok lain	X					1
4	Pengrusakan fasilitas Pilkada	X					1
5	Sabotase pelaksanaan pemungutan suara	X					1
6	Politik uang		X				2
7	Sengketa hasil penghitungan suara			X			3
8	Serangan pok kriminal bersenjata	X					1
9	Serangan teroris	X					1
10	Intimidasi terhadap penyelenggara	X					1
11	Intimidasi terhadap masyarakat	X					1
12	ASN tidak netral		X				2
13	Aparat tidak netral	X					1
14	Hambatan distribusi logistik Pilkada		X				2
15	Sarpras penyelenggaraan tidak memadai	X					1
16	<i>Black campaign</i>			X			3
17	Provokasi			X			3
18	Politik uang		X				2
19	Penggunaan fasilitas negara oleh peserta Pilkada		X				2
20	DPT bermasalah		X				2
21	Penyelenggara tidak profesional	X					1
22	Perusakan Alat Peraga Pilkada		X				2
23	Penggelembungan suara	X					1
24	Pencurian Kotak Suara	X					1
25	Petugas KPU tidak Netral	X					1
26	Gangguan jaringan komunikasi		X				2
27	Gangguan jaringan listrik		X				2
28	Bencana alam		X				2
29	Protes/unjuk rasa			X			3
JUMLAH							47
NILAI (JUMLAH dibagi 29)						1,62	

II. Keterangan dan petunjuk pengisian :

1. Keterangan :

- a. SR : Sangat Rendah Nilai : 1
- b. R : Rendah Nilai : 2
- c. S : Sedang Nilai : 3
- d. T : Tinggi Nilai : 4
- e. ST : Sangat Tinggi Nilai : 5

2. Petunjuk Pengisian:

- a. Pengisian tabel dengan mencantumkan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai dengan wilayah Pilkada masing-masing.
- b. Kategori kerawanan didasarkan pada kondisi, kejadian atau situasi sebelumnya yang dipadukan dengan pengamatan tim selama di wilayah dan diprediksikan akan terjadi kedepannya.
- c. Total nilai = Jumlah dibagi 29

A.n Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko
Kordiv Pengawasan , Humas dan Hubal

